

Implementasi Budaya Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Pasang Ri Kajang pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Emil Fatra¹, Thiara Tri Funni Manguma², Rusli

¹Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Almarisah Madani

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Almarisah Madani

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Timur

e-mail: emil.fatra21@gmail.com

Abstrak

Kearifan lokal Pasang Ri Kajang merupakan pedoman hidup masyarakat adat Kajang (Keammatoaan) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai budaya komunikasi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kategorisasi budaya komunikasi organisasi serta implementasi budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal Pasang Ri Kajang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kategorisasi budaya komunikasi organisasi yang diterapkan dalam pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yaitu prinsip Lambusu na Gattang yang bermakna kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, dan kedisiplinan; Palampa Paunnu yang bermakna keterbukaan, khususnya dalam penyampaian informasi dan pengelolaan program pembangunan; Assipakatau yang bermakna menciptakan keharmonisan serta saling menghargai antarsesama pegawai; dan Sipatuntung yang bermakna saling mendorong, memotivasi, serta membangun sinergi di antara seluruh anggota organisasi. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal Pasang Ri Kajang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival budaya tahunan (parade mengenakan pakaian adat berwarna hitam), penerapan prinsip Tallasa Kamase-masea yang menekankan kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu, prinsip Allemo Si Batu yang mengajarkan persatuan dan pelestarian nilai-nilai budaya, serta penerapan budaya Siri', yaitu budaya rasa malu dan kesadaran diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Kata kunci: *Komunikasi Organisasi; Etnografi Komunikasi; Kearifan Lokal; Pasang Ri Kajang; Pembangunan Daerah.*

Abstract

Pasang Ri Kajang local wisdom serves as the guiding philosophy of life for the Kajang indigenous community (Keammatoaan) and has been adopted by the Government of Bulukumba Regency as the foundation of its organizational communication culture. This study aims to identify the forms of organizational communication culture categorization and examine the implementation of an organizational communication culture based on the local wisdom of Pasang Ri Kajang within the Government of Bulukumba Regency. The study employed a qualitative descriptive method using a communication ethnography approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal four main categories of organizational communication culture implemented within the Bulukumba Regency Government. These include the principle of Lambusu na Gattang, which emphasizes honesty, adherence to rules, and discipline; Palampa Paunnu, which promotes openness, particularly in information dissemination and the management of development programs; Assipakatau, which fosters harmony and mutual respect among employees; and Sipatuntung, which encourages mutual support, motivation, and synergy among organizational members. Furthermore, the study found that the implementation of an organizational communication culture based on Pasang Ri Kajang local wisdom is manifested through several practices, including the organization of an annual cultural festival featuring participants dressed in traditional black attire, the application of the Tallasa Kamase-masea principle, which emphasizes simplicity and self-restraint, the Allemo Si Batu principle, which promotes unity and the preservation of cultural values, and the practice of Siri', a cultural value emphasizing shame, self-awareness, and moral responsibility to avoid actions that may harm society.

Keywords: *Organizational Communication; Communication Ethnography; Local Wisdom; Pasang Ri Kajang; Regional Development.*

LATAR BELAKANG

Pendekatan pembangunan melalui budaya komunikasi organisasi yang berbasis pada kearifan lokal Pasang Ri Kajang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah. Saat ini pemerintah berperan sebagai garda terdepan sekaligus katalisator yang memiliki peran penting dalam menyusun program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan strategi dan metode pembangunan yang jelas agar proses pembangunan dapat terlaksana tanpa menimbulkan kesenjangan maupun ketidakadilan. Munculnya berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan program pembangunan maupun para pelaku dan pengambil kebijakan dalam proses pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pembahasan mengenai pembangunan telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II, ketika banyak negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial memperoleh kemerdekaan dan berupaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan (Nasution, 2012). Seiring perkembangan wacana pembangunan, khususnya setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, muncul pandangan yang menyatakan bahwa "pembangunan telah mati". Ungkapan tersebut bersifat provokatif karena menggambarkan seolah-olah pembangunan tidak lagi memiliki makna. Pandangan ini muncul akibat pembangunan yang masih didominasi pendekatan top-down (berorientasi pada kepentingan pemerintah) dibandingkan dengan pendekatan bottom-up (berorientasi pada kepentingan masyarakat). Akibatnya, berbagai bentuk perencanaan pembangunan dinilai kurang tepat sasaran, bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi ruang terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan pembangunan yang merugikan masyarakat. Lemahnya perspektif mengenai pola pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masih menjadi persoalan hingga saat ini (Elvinaro & Rochajat, 2017).

Pandangan bahwa pembangunan telah mengalami kegagalan juga diperkuat oleh kenyataan bahwa pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih banyak menggunakan pendekatan teori Barat yang belum tentu sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Pembangunan yang dipandang sebagai bentuk modernisasi sering kali identik dengan proses westernisasi sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal bangsa sendiri (Nasution, 2012). Kearifan lokal merupakan landasan pembangunan yang berorientasi pada kehidupan sosial serta mengandung nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, pembangunan tidak berarti bahwa seluruh hal baru harus diterima begitu saja. Setiap perubahan perlu diseleksi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, nilai-nilai lama juga tidak harus ditinggalkan, melainkan dipilih dan dipertahankan apabila mengandung nilai-nilai positif sebagai modal sosial (social capital) dalam pembangunan bangsa (Cangara, 2020).

Pembangunan tidak hanya membutuhkan strategi, tetapi juga pendekatan yang humanis agar tidak semata-mata menjadi aktivitas politik. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mendorong keberhasilan pembangunan adalah dengan menerapkan budaya komunikasi organisasi yang berlandaskan kearifan lokal di dalam lembaga pemerintahan. Berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan telah mendorong pemerintah untuk menyadari pentingnya pembangunan daerah yang berbasis pada kearifan lokal. Saat ini, pendekatan tersebut telah menjadi salah satu program utama pemerintah. Penerapan pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai lokal pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap citra dan reputasi suatu daerah. Berangkat dari potensi lokal, berbagai daerah maupun organisasi terdorong untuk mengembangkan pembangunan yang lebih bermanfaat secara bertahap. Pendekatan ini juga dianggap sebagai landasan yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia dengan mengedepankan sistem kearifan lokal masing-masing daerah (Tresnawaty, 2020). Menerapkan nilai-nilai kearifan lokal ke

dalam budaya komunikasi organisasi pemerintahan bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun demikian, upaya tersebut mampu mendorong pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan perubahan sosial dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh berbagai komunitas di Indonesia. Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai yang memuat pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdasarkan pertimbangan yang arif dan humanis. Nilai-nilai tersebut tumbuh melalui pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta diwariskan dari generasi ke generasi (Andi M. Syarifuddin Akhmar, 2007).

Budaya komunikasi organisasi dalam lembaga pemerintahan merupakan implementasi nilai-nilai luhur suatu daerah. Budaya menjadi simbol sekaligus identitas yang membentuk karakter suatu masyarakat, organisasi, maupun pemerintahan. Melalui budaya, tingkat kemajuan suatu bangsa dapat tercermin. Oleh karena itu, budaya memiliki peran penting dalam membangun identitas sosial (Nur Hidayah Rusli & Indah Evatul Djannah, 2020). Pada dasarnya, budaya komunikasi organisasi tidak hanya berfungsi meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah maupun perusahaan, tetapi juga memberikan pemahaman baru mengenai nilai-nilai yang lahir dari kearifan lokal (Bunga Melisa Altamira & Effy Rusfian, 2019).

Budaya komunikasi organisasi memiliki peran sentral dalam menjaga efektivitas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal (Jujung Dwi Marta & Dewie Tri Wijayati, 2018). Sebagai pelaksana budaya komunikasi organisasi, pemerintah harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam program-program pemerintahan secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai pada tingkat paling bawah, wajib mematuhi budaya organisasi tersebut. Budaya komunikasi organisasi tidak hanya mengatur seperangkat nilai yang harus dipatuhi, tetapi juga membentuk pola komunikasi yang aktif. Melalui budaya organisasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pendekatan musyawarah tanpa mengabaikan substansi keputusan yang telah disepakati.

Budaya komunikasi organisasi diyakini mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui penerapan aturan, kedisiplinan, keterbukaan, dan efektivitas kerja seluruh anggota organisasi. Implementasi budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal di lembaga pemerintahan juga merupakan bentuk pelaksanaan amanah rakyat. Selain itu, penerapan budaya komunikasi organisasi menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya program pembangunan (Wibowo, 2016).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara kearifan lokal dengan pembangunan daerah. Penelitian Betty Tresnawaty menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal Sabilulungan dimanfaatkan sebagai strategi kehumasan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung pembangunan yang lebih humanis dan tepat sasaran (Tresnawaty, 2020). Penelitian Muttaqin dan Rijal Muhammad Mustari juga menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal sebagai strategi kehumasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Penelitian Sarmiati menemukan bahwa penerapan kearifan lokal dalam program pengentasan kemiskinan mampu meningkatkan solidaritas, kejujuran, dan nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan program pemerintah. Penelitian lain mengenai komunikasi pembangunan berkelanjutan di desa wisata Yogyakarta menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan lokal berupa bambu mampu meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memperkuat kerja sama masyarakat.

Penelitian mengenai Gethok Tular sebagai pola komunikasi gerakan sosial masyarakat Samin di Sukolilo juga memperlihatkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat hubungan sosial masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada strategi kehumasan atau komunikasi pembangunan, penelitian ini berfokus pada implementasi kearifan lokal sebagai budaya komunikasi organisasi yang diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pimpinan hingga pegawai pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melihat bahwa nilai-nilai Pasang Ri Kajang memiliki potensi besar sebagai dasar budaya komunikasi organisasi. Nilai-nilai tersebut mencakup musyawarah, gotong royong, pelaksanaan ritual keagamaan, serta pelestarian lingkungan hidup (Kamaluddin & Mustolehudin, 2020). Pasang Ri Kajang sendiri merupakan amanat, pesan, aturan, dan pedoman hidup yang wajib dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang (Abdullah, Cangara, & Mahmud Tang, 2014). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, diperlukan strategi pembangunan melalui budaya komunikasi organisasi yang berbasis pada kearifan lokal. Pemerintah perlu mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pasang Ri Kajang, yang pada hakikatnya mengajarkan setiap individu untuk menaati aturan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan (Darmapoetra, 2014).

Menurut peneliti, apabila seluruh unsur pemerintahan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pasang Ri Kajang secara konsisten, maka berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Sebagai budaya kerja baru, nilai-nilai Pasang Ri Kajang seharusnya dipahami oleh seluruh pengambil kebijakan, mulai dari Bupati hingga Kepala Desa. Peneliti juga melihat bahwa implementasi budaya komunikasi organisasi melalui nilai-nilai Pasang Ri Kajang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun budaya komunikasi organisasi yang berlandaskan kearifan lokal sehingga mampu menciptakan budaya kerja yang sehat, bebas dari pelanggaran birokrasi, serta mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara konsisten dengan menjadikan nilai-nilai Pasang Ri Kajang sebagai pedoman utama dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pembangunan tetap berlangsung dan terus diperjuangkan melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai budaya

Tinjaun Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara kearifan lokal dengan pembangunan daerah. Penelitian Betty Tresnawaty menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal Sabilulungan dimanfaatkan sebagai strategi kehumasan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung pembangunan yang lebih humanis dan tepat sasaran (Tresnawaty, 2020). Penelitian Muttaqin dan Rijal Muhammad Mustari juga menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal sebagai strategi kehumasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Penelitian Sarmiati menemukan bahwa penerapan kearifan lokal dalam program pengentasan kemiskinan mampu meningkatkan solidaritas, kejujuran, dan nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan program pemerintah. Penelitian lain mengenai komunikasi pembangunan berkelanjutan di desa wisata Yogyakarta menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan lokal berupa bambu mampu meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memperkuat kerja sama masyarakat.

Penelitian mengenai Gethok Tular sebagai pola komunikasi gerakan sosial masyarakat Samin di Sukolilo juga memperlihatkan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat hubungan sosial masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada strategi kehumasan atau komunikasi pembangunan, penelitian ini berfokus pada implementasi kearifan lokal sebagai budaya komunikasi organisasi yang diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pimpinan hingga pegawai pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melihat bahwa nilai-nilai Pasang Ri Kajang memiliki potensi besar sebagai dasar budaya komunikasi organisasi. Nilai-nilai tersebut mencakup musyawarah, gotong royong, pelaksanaan ritual keagamaan, serta pelestarian lingkungan hidup (Kamaluddin & Mustolehudin, 2020). Pasang Ri Kajang sendiri merupakan amanat, pesan, aturan, dan pedoman hidup yang wajib dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang (Abdullah, Cangara, & Mahmud Tang, 2014). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, diperlukan strategi pembangunan melalui budaya komunikasi organisasi yang berbasis pada kearifan lokal. Pemerintah perlu mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pasang Ri Kajang, yang pada hakikatnya mengajarkan setiap individu untuk menaati aturan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan (Darmapoetra, 2014). Menurut peneliti, apabila seluruh unsur pemerintahan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pasang Ri Kajang secara konsisten, maka berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Sebagai budaya kerja baru, nilai-nilai Pasang Ri Kajang seharusnya dipahami oleh seluruh pengambil kebijakan, mulai dari Bupati hingga Kepala Desa. Peneliti juga melihat bahwa implementasi budaya komunikasi organisasi melalui nilai-nilai Pasang Ri Kajang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang berangkat dari teori menuju konsep berdasarkan realitas yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif, yaitu menghubungkan metode penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui proses observasi. Oleh karena itu, seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif sehingga keabsahan dan ketepatan data dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan kualitatif menekankan pada fakta-fakta empiris sekaligus makna yang dirasakan dari fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif berangkat dari persepsi dan hasil pengamatan peneliti terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan, melainkan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan peneliti sesuai dengan kriteria penelitian serta kesesuaian tugas dan fungsi informan dengan fokus permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian. Pemilihan ketiga teknik tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa metode tersebut mampu memberikan data yang komprehensif serta memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah kondensasi data (data condensation), yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasi data hasil wawancara maupun hasil pengumpulan data lainnya. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses mengelompokkan serta menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sekaligus melakukan klarifikasi terhadap data yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berupa narasi, interpretasi, dan pemaknaan terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan. Temuan-temuan tersebut kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal Pasang Ri Kajang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan secara sistematis dan realistis fenomena yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kategorisasi Budaya Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Pasang Ri Kajang pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kategorisasi budaya komunikasi organisasi yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Pasang Ri Kajang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan empat bentuk utama budaya komunikasi organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

a. Prinsip Lambusu' na Gattang (Kejujuran dan Ketegasan dalam Menjalankan Aturan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya komunikasi organisasi berbasis Pasang Ri Kajang diawali dengan penanaman nilai kejujuran dan kedisiplinan melalui prinsip Tau Lambusu' na Gattang. Nilai tersebut tercermin dalam penerapan aturan kedisiplinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Disiplin dipandang sebagai faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas organisasi, khususnya dalam menjaga integritas aparatur pemerintah melalui kepatuhan terhadap aturan, disiplin waktu, tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta komitmen terhadap etika kerja. Prinsip Lambusu' na Gattang mengandung makna bahwa setiap pejabat maupun pegawai harus menjalankan amanah dengan penuh kejujuran, ketegasan, dan tanggung jawab. Kejujuran diposisikan sebagai nilai utama dalam birokrasi sehingga setiap aparatur pemerintah dituntut mampu melaksanakan tugas tanpa melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku. Selain bermakna jujur, prinsip ini juga mengajarkan kemampuan mengendalikan diri dari segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma dan peraturan. Dalam perspektif masyarakat adat Kajang, seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya melalui perilaku yang berintegritas tinggi. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi struktural, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang dijalankan dengan pendekatan humanis, persuasif, komunikatif, serta berlandaskan sistem nilai kearifan lokal. Budaya organisasi yang dibangun melalui prinsip Lambusu' na Gattang diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang berjalan secara efektif apabila seluruh aparatur memiliki kejujuran serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi kebersihan di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan. Lingkungan yang sebelumnya dipenuhi sampah kini menjadi lebih tertata sebagai hasil dari meningkatnya kedisiplinan

aparatur pemerintah yang turut memberikan teladan kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

b. Palampa Paunnu (Keterbukaan)

Prinsip Palampa Paunnu bermakna keterbukaan dan tidak menyembunyikan informasi, terutama yang berkaitan dengan keputusan pemerintah maupun kepentingan masyarakat luas. Nilai ini menekankan pentingnya menyampaikan informasi secara terbuka, khususnya mengenai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam konteks budaya komunikasi organisasi, keterbukaan menjadi salah satu unsur penting yang harus diwujudkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah dituntut memberikan akses informasi kepada masyarakat sehingga seluruh kebijakan pembangunan dapat diketahui secara transparan. Keterbukaan juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yaitu bebas dari praktik manipulasi birokrasi maupun penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, nilai Palampa Paunnu menjadi salah satu representasi utama dari budaya komunikasi organisasi yang berakar pada nilai-nilai Pasang Ri Kajang. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip keterbukaan belum sepenuhnya optimal. Praktik korupsi, intervensi terhadap proses pengambilan keputusan, serta persoalan pendanaan proyek pembangunan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

c. Assipakatau (Menciptakan Keharmonisan)

Prinsip Assipakatau dimaknai sebagai sikap saling menghargai, memanusiakan sesama, dan membangun hubungan yang harmonis antarmanusia. Dalam lingkungan pemerintahan, nilai ini diwujudkan melalui hubungan kerja yang saling menghormati antara pimpinan dan pegawai maupun antarsesama pegawai. Nilai Assipakatau merupakan implementasi dari ajaran Pasang Ri Kajang yang menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, serta pembentukan hubungan sosial yang harmonis. Nilai tersebut sangat relevan diterapkan dalam organisasi pemerintahan karena keharmonisan hubungan kerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan kekeluargaan yang melibatkan seluruh aparatur pemerintah sebagai upaya mempererat hubungan antarsesama pegawai. Walaupun terlihat sederhana, kegiatan tersebut

memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya budaya organisasi yang kondusif serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

Dalam kehidupan masyarakat Kajang sendiri, perilaku komunikasi yang diajarkan melalui Pasang Ri Kajang selalu menempatkan manusia sebagai pribadi yang harus dihormati dan diperlakukan secara bermartabat. Nilai kemanusiaan inilah yang kemudian diadopsi sebagai salah satu dasar budaya komunikasi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

d. Sipatuntung (Saling Memotivasi)

Kategori terakhir adalah Sipatuntung, yaitu nilai yang mengajarkan pentingnya saling menghargai, mendukung, dan memotivasi antarsesama. Dalam ajaran Pasang Ri Kajang, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang lain ketika menghadapi kesulitan serta memberikan dorongan agar mampu berkembang bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya saling memotivasi telah menjadi bagian dari kehidupan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sikap saling membantu tidak hanya terjadi di antara pegawai pada tingkat pelaksana, tetapi juga ditunjukkan oleh para pimpinan daerah. Dalam setiap pertemuan rutin, pimpinan organisasi secara konsisten memberikan motivasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pegawai agar tetap memiliki semangat kerja yang tinggi, merasa dihargai, dan memperoleh dukungan dalam melaksanakan tugasnya. Melalui penerapan nilai Sipatuntung, hubungan kerja yang terjalin di lingkungan pemerintahan menjadi lebih harmonis, kolaboratif, dan mampu menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan organisasi maupun keberhasilan program pembangunan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal Pasang Ri Kajang telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba melalui beberapa bentuk kategorisasi budaya organisasi. Kategorisasi tersebut meliputi prinsip Lambusu' na Gattang yang menekankan kejujuran, ketegasan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas; Palampa Paunnu yang mengedepankan keterbukaan dalam penyampaian informasi dan pengambilan keputusan; Assipakatau yang menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis melalui sikap saling menghargai antarsesama; serta Sipatuntung yang mendorong terciptanya budaya saling memotivasi, mendukung, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Implementasi budaya komunikasi organisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pasang Ri Kajang ke dalam praktik

pemerintahan, antara lain penyelenggaraan festival budaya tahunan sebagai media pelestarian budaya dan internalisasi nilai lokal, penerapan prinsip Kamase-masea yang menanamkan kesederhanaan dalam kepemimpinan dan pelayanan publik, penguatan prinsip Allemo Si Batu yang menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan, serta pengembangan budaya Siri' (rasa malu) sebagai kontrol moral untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan integritas aparatur pemerintah. Meskipun berbagai nilai budaya tersebut telah diterapkan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan. Upaya peningkatan konsistensi dalam penerapan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas masih diperlukan agar budaya komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal benar-benar mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada masyarakat Suku Kajang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad M, Hafied Cangara, and Mahmud Tang. "Komunitas Tradisional Kajang Di Tengah Transformasi Komunikasi Dan Informasi." *Jurnal Komunikasi Kareba* 3, no. 2 (2014): 103–111.
- Adriyani, Ayu, Partini Partini, and Muhammad Sulhan. "Negosiasi Identitas Masyarakat Adat Ammatoa Terhadap Sistem Pendidikan Modern." *Jurnal Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 83–96.
- Akhmar, Andi M. Syarifuddin. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: Masagena Press, 2007.
- Altamira, Bunga Melisa, and Effy Rusfian. "Komunikasi Organisasi Dalam Proses Pembentukan Budaya Organisasi (Studi Nilai Budaya Organisasi I'Ve Care Pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 1 (2019): 51–59.
- Arifin, Pupung, and Nicolaus Nino Ardhiansyah. "Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Yogyakarta." *Jurnal Nomosleca* 6, no. 1 (2020).
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Pembangunan*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Darmapoetra, Juma. *Kajang Pecinta Kebersamaan Dan Pelestarian Alam*. Makassar: ARUS TIMUR, 2014.
- Darmastuti, Rini, Atwar Bajari, Haryo S Martodirdjo, and Eni Maryani. "Gethok Tular, Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat

- Samin Di Sukolilo." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 1 (2016): 104.
- Fauzi. "Komunikasi Organisasi Dalam Teori Budaya Organisasi Michael Pacanowsky Dan Nick O'Donnel Trujillo." *Kebangsaan* 9, no. 18 (2020): 56–62. <http://jurnal.uniki.ac.id/index.php/jkb/article/view/23/24>.
- Harun Rochajat, Ardianto Elvinaro. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Husain, Andi Hasan Al. "Komunikasi Kesehatan Dokter Dan Pasien Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 2 (2020): 126.
- Kamaluddin, and Mustolehudin. "Pasang Ri Kajang: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan Di Bulukumba Sulawesi Selatan." *PENAMAS* 33, no. 1 (2020): 133–152.
- Marta, Jujung Dwi, and Dewie Tri Wijayati. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. X." *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* 8, no. 2 (2018): 218.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. 4th ed. Jakarta: PRAMEDIA GROUP, 2013.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 9th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyana, Deddy & Solatun. *Metode Penelitian Komunikasi*. 3rd ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mustari, Muttaqin & Rijal Muhammad. "Aktivitas Humas Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal DALAM Meningkatkan Destinasi Wisata Di Kabupaten Kepulauan Selayar." *Jurna Stimuli* 53, no. 9 (2015): 1689–1699. <https://www.jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/stimuli/article/view/14>.
- Nasution, Sulkarimen. *Komunikasi Pembangunan*. 8th ed. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012.
- Rahmayani, Eva, Muh Nadjib, and Kahar. "Pola Perilaku Komunikasi Masyarakat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang." *Jurnal Komunikasi Kareba* 6, no. 2 (2017): 361.
- Rusli, Nur Hidayah, and Indah Evatul Djannah. "Pola Gaya Bahasa Dan Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Budaya Serta Adat Istiadat Masyarakat Ammatoa Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan." In *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 743–752, 2020. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/936>.
- Sarmiati. "Strategi Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2012): 28–39. <https://media.neliti.com/media/publications/101067-ID-strategi-komunikasi-berbasis-kearifan-lo.pdf>.
- Suparmini, Sriadi Setyawati, and Dyah Respati Suryo Sumunar. "Berbasis

- Kearifan Lokal.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 18, no. 1 (2013): 8–22.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3180/2665>.
- Supratman, Lucy Pujasari. “Pola Komunikasi Organisasi Kepemimpinan Strategis Di PT TelkomSel.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2018): 31.
- Tresnawaty, Betty. “Prinsip Kearifan Lokal ‘Sabilungan Dalam Pengembangan Strategi Kehumasan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4, no. 2 (2020): 229–248.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik>.
- Wibowo. *Budaya Organisasi*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.